

PERMASALAHAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Hadi Siswanto
Universitas Islam Balitar
Jl. Majapahit No. 2-4 Blitar
Email: hadi.siswanto071@gmail.com

Abstract: A nine-year compulsory learning in Indonesia is a major program for all children. However, several problems seem to be unsolved as the focus of the is bias. This paper describes the role of basic education and its drawbacks. The limitation arises from management and restricts conditions where teachers and facilities are in trivialities. Basic education in Indonesia is now developing and three kinds of institution exist at present: Elementary School, Islamic School, and Boarding School. The institutions are basic model of Indonesian elementary school, but they receive different treatments.

Keywords: elementary school, Islamic school, boarding school.

Pendidikan dasar di Indonesia menghapai persoalan yang rumit karena beberapa hal. *Pertama*, sejak zaman Orde Baru yang memerintah Indonesia selama 32 tahun, pengelolaan pendidikan dasar termarginalkan; aspek pendidikan diserahkan ke Dinas Pendidikan, sementara aspek kepegawaiannya diserahkan ke Depdagri. *Kedua*, terjadi dualisme pengelolaan sehingga tidak terfokus pengembangan pengelolaan secara padu. Pengembangan kurikulum dan pengajaran tidak sejalan dengan pengembangan sarana-prasarana dan pendukung lainnya.

Secara empiris, persoalan tersebut menimbulkan permasalahan yang mendasar di lapangan. Secara makro, anggaran pendidikan untuk sekolah dasar tidak mengalami kemajuan dan peningkatan yang berarti. Hal ini nampak dalam kebijakan penambahan guru, peningkatan kualitas guru, penambahan gedung baru, penambahan sarana-prasarana baru, dan program pembelajaran untuk anak didik. Secara mikro, kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas SD tidak banyak berubah. Kualitas bias diukur misalnya dari bagaimana guru ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan, berapa guru ditingkatkan kualifikasi pendidikannya melalui studi lanjut, berapa subsidi yang diberikan untuk setiap anak selama sekolah.

Evaluasi yang selama ini dilakukan lebih banyak mengarah pada evaluasi kuantitatif yang melihat jumlah siswa yang lulus. Untuk itu, keberhasilan lebih digunakan untuk melihat jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa yang menempuh sekolah setiap tahun. Jika APK dan APM bertambah, dikatakan penyelenggaraan pendidikan SD berhasil. Sebaliknya jika APM dan APK menurun, dikatakan pelaksanaan pendidikan SD gagal sehingga perlu dilakukan langkah-langkah terobosan.

Dengan diberlakukannya program Wajar 9 Tahun, usaha berbagai pihak mendorong agar anak mau sekolah sampai sekurang-kurangnya tamat tingkat SLTP (SD 6 tahun + SLTP 3 tahun = 9 tahun) menjadi begitu gencar. Target ini di satu sisi mendorong pelaksanaan pendidikan secara baik; tetapi di sisi lain, terjadi kecenderungan bahwa pemerintah lebih mendorong masyarakat agar menyekolahkan anak-anaknya sampai tamat SLTP dibanding mencoba mengoptimalkan mutu lulusan.

Persoalan pendidikan di Indonesia secara umum sama. Namun, ada enam persoalan teknis yang bias berlaku menyeluruh di wilayah Indonesia. Keenam persoalan tersebut ialah:

Pertama, koordinasi pengelolaan pendidikan dasar antarinstansi (pengelolaan SD, Depag-Dikbud-Pemda) kurang koordinasi. Sebelum era reformasi, pengelolaan SD diserahkan ke dua instansi: diknas dan depdagri. Untuk urusan akademis, termasuk kurikulum ditangani oleh Diknas, sedangkan untuk kepegawaian ditangani oleh gubernur/bupati. Dualisme pengelolaan ini secara substansial berpengaruh pada perencanaan kurikulum, penambahan guru, penambahan gedung sekolah. Kini pengelolaan diserahkan ke Dinas Pendidikan. Namun demikian, penanganan secara spesifik dan pengembangan program di SD masih menjadi persoalan berat. Permasalahan yang sampai saat ini amat kompleks menyangkut penambahan jumlah guru, peningkatan kualifikasi guru, penambahan gedung sekolah, dan manajemen sekolah. Hal-hal tersebut merupakan dampak dari persoalan lama, tetapi juga merupakan hambatan yang kompleks karena koordinasi yang lemah.

Kedua, kebijakan pendidikan (visi, misi) untuk SLTP/SLTA yang tersentralisasi. Sentralisasi memang merupakan persoalan yang muncul dari zaman sebelum otonomi. Namun kini, ketika otonomi sudah dijalankan, sentralisasi SLTP/SLTA juga masih cukup kuat. Tidak semua kebijakan pendidikan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah. Rekrutmen guru, pengadaan gedung baru, dan peningkatan kualitas guru masih banyak menunggu kebijakan pusat.

Ketiga, anggaran pendidikan nasional terkotak-kotak, misalnya anggaran rutin (DIK), anggaran pembangunan (DIP), yang masing-masing memiliki ketentuan pengelolaan sendiri-sendiri.

Keempat, manajemen sekolah tidak efektif. Kepala sekolah kurang otonom karena hanya sebagai klerikal. Kemampuan manajerial dan kepemimpinan kurang memadai. Bank Dunia mengidentifikasi (a) kepala sekolah tidak memiliki kewenangan yang cukup dalam mengelola keuangan sekolah, (b) kemampuan manajemen kepala sekolah umumnya rendah, terutama di sekolah negeri, (c) pola anggaran tidak memungkinkan guru yang mengajar baik memperoleh insentif, dan (d) peran serta masyarakat sangat kecil dalam pengelolaan sekolah.

Kelima, motto bahwa pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah, keluarga dan masyarakat tampaknya baru teknis ekonomis, untuk menarik dana dari orangtua dan masyarakat, bukan partisipasi dalam aspek tujuan, isi, proses, evaluasi.

Keenam, pembinaan karier dan kesejahteraan guru tidak konsisten, berikutan maraknya pungutan liar gaji guru, telah menurunkan kinerja pendidikan dan rendahnya pandangan masyarakat terhadap status guru.

PENDIDIKAN DASAR

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1990 sistem persekolahan di Indonesia secara umum dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Tingkat Pendidikan Dasar, Tingkat Pendidikan Menengah, dan Tingkat Pendidikan Tinggi. Yang termasuk Tingkat Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyal (MT), Sekolah lanjutan Pertama (SLP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan yang sederajat dengannya. Sedang yang termasuk Tingkat Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan yang sederajat dengannya. Dan yang termasuk Tingkat Pendidikan Tinggi adalah Universitas, Institut, Akademi Politeknik, dan Sekolah Tinggi.

Pendidikan dasar merupakan komponen yang memerlukan perhatian khusus. Berbeda jauh dari SMU dan PT, Pendidikan Dasar memerlukan pendekatan aspirasi sosial, kesempatan belajar seluas-luasnya bagi semua anak. Pendekatan kerakyatan, sebutlah demokrasi, dipancang pertama-tama di Sekolah Dasar. Berbeda dengan jenjang persekolahan lebih tinggi, untuk masuk sekolah dasar anak tidak perlu diseleksi dengan alasan atau cara apapun. Jenjangnya memang paling rendah, pendidikan dan kesejahteraan gurunya paling rendah, mutu fasilitas dan prasarana paling rendah, anggarannya juga paling rendah. Sensitivitas di media massa juga paling rendah (Hamijoyo, 2000).

Memang Pendidikan Dasar bukan 'selebriti' di kalangan pendidikan. Karena itu kesulitan dan kendala struktural dan teknisnya justru paling besar. Menurut Hamijoyo (2000) kesulitan atau penghalang yang paling besar adalah faktor-faktor teknis-didaktis. Di tengah-tengah kerumitan itu, kita harus tetap konsekuen pada misi pendidikan dasar untuk membimbing anak, untuk menghayati dunia sekunder dan primer, untuk membuka tabir semua rahasia alam dan zaman sesuai dengan rentang pemahamannya (span of apprehension).

Jika Jerome Bruner dan Piaget benar, maka guru Sekolah Dasar yang peka dan cerdas dapat mengajak anak-anak yang muda belia untuk belajar berfikir kritis, mencerna perbandingan dan analisis. Yang paling penting bagi anak sekolah dasar itu justru bukan hanya pemahaman struktur pengetahuan saja, tetapi terutama sensitivitas pada dunia sekelilingnya yang menyimpan seribu satu kenyataan, baik yang indah maupun yang bopeng. Maka itu secara jujur saja, mengajar di Sekolah Dasar tidak kalah sulitnya dibandingkan mengajar dijenjang lebih tinggi. Dasar-dasar logika sederhana sudah boleh diajarkan di Sekolah Dasar, tetapi jangan dikira bahwa pendekatan logis bisa mencapai hasil yang diharapkan. Pengetahuan dan pengalaman praktis guru mungkin berpengaruh pada *scholastic performance* dan kemampuan keterampilan, tetapi kepribadian_guru akan mewarnai nilai sikap dan perilaku anak mungkin sampai akhir hayatnya (Hamijoyo, 2000).

Kurikulum formal pendidikan dasar tidak perlu banyak diubah, kecuali jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran yang perlu ditinjau kembali dengan cermat, antara lain dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial-budaya dan ekonomi rakyat kebanyakan. Yang justru perlu dicermati adalah kurikulum yang 'informal' yang tidak tertulis atau 'intangible' tetapi dalam kenyataannya ada. Keseluruhan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku pedagogis-didaktis guru yang sangat berdampak pada sikap dan perilaku murid inilah yang harus kita catat, kita rekonstruksi menjadi kiat-kiat yang terkonsolidasi agar dapat menjadi buku pegangan guru yang tak ternilai harganya (Hamijoyo, 2000).

MADRASAH

Uraian diarahkan untuk melihat posisi dan potensi sekolah madrasah sebagai bagian dari pendidikan dasar. Bersama-sama dengan SD, madrasah dipandang sebagai lembaga yang perlu sekali mendapat perhatian dan pengelolaan khusus.

Menurut Hamijoyo (2000) salah satu lembaga pendidikan yang khas adalah Madrasah. Khas karena madrasah selain bernafaskan keagamaan (Islam), secara berangsur melebarkan wawasan Iptek dan kemasyarakatan yang makin menduniawi. Kecenderungan yang makin kuat ini tentunya lebih mempermudah para lulusannya masuk ke mainstream nasional. Bahkan mungkin masuk dengan lebih tegar karena ada nilai tambah yaitu pengetahuan dan sikap keagamaannya.

Sampai sekarang madrasah (yang negeri) dikelola dan bertanggung jawab kepada Departemen Agama. Hal tersebut bukan masalah, asalkan Departemen Agama melaksanakan tugas-kewajibannya secara terkonsentrasi dan mempertanggungjawabkannya secara publik, tidak hanya kepada orang tua murid, tetapi juga kepada masyarakat umum. Untuk menjalankan tugas-kewajiban (*responsibility*) kekuasaan (*authority*) dan pertanggungjawabannya (*accountability*) secara penuh, perlu dipertimbangkan berdirinya Direktorat Jenderal atau Badan Pemberdayaan Madrasah di dalam lingkungan Departemen Agama. Prioritas utamanya adalah perbaikan mutu pendidikan umum dan keagamaan yang merata, karena cukup banyak madrasah negeri apalagi swasta pada umumnya masih dalam keadaan yang memprihatinkan.

Hamijoyo (2000) mengatakan banyak kelemahan pada keenam dimensi belajar-mengajar, yaitu mutu guru, seleksi murid, kurikulum terutama struktur, metode dan sistem penilaian, sarana dan prasarana manajemen dan lingkungan pendukung. Subsidi sangat diperlukan, terutama sekali bagi madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, yang harus dialokasikan secara selektif. Dalam hubungan ini madrasah swasta yang umumnya kondisinya sangat memprihatinkan perlu dapat perhatian khusus. Mereka harus dibimbing agar potensi masyarakat swasta yang kelihatannya cukup kuat bisa direalisasikan dengan tepat.

Status dan prestasi madrasah pada umumnya perlu dikontrol agar masyarakat tingkat bawah tidak ragu-ragu. Jangan sampai golongan pimpinan agama sendiri tidak menyekolahkan anaknya ke madrasah, hanya karena kurangnya aksebilitas lulusan madrasah memasuki perguruan tinggi pada umumnya. Harus dicegah agar madrasah tidak menjadi semacam sekolah 'kelas dua'.

Dalam negara dengan penduduk muslim lebih dari 87%, pemerintah termasuk Depdiknas, perlu menunjukkan komitmen politik keuangan dan pendidikan lebih besar dari sekarang. Madrasah bisa menjadi lembaga yang bisa meniupkan angin kemajuan Iptek dan kemasyarakatan pada masyarakat 'pinggiran'.

Madrasah sendiri harus menunda ekspansi, dan lebih mengkonsentrasi pada mutu belajar mengajar termasuk seleksi dan pendidikan guru, sarana belajar dan media mengajar, struktur kurikulum yang relevan dengan tuntutan nasional dan global. Kerjasama saling tukar pengetahuan, keterampilan dan pengalaman antara guru sekolah umum dan madrasah yang setara perlu digalakkan dan dilembagakan. Kerja sama teratur antara kantor pendidikan wilayah kecamatan misalnya, dengan kantor pendidikan agama bisa diusahakan dengan bimbingan dan bombongan para pendidik, budayawan dan agamawan.

PESANTREN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan masyarakat keagamaan yang sangat unik. Lahir dengan tekad syiar agama yang kuat kemudian tampak menambah wawasan pendidikan umum yang dari masa ke masa menjadi makin kuat. Lulusannya terkenal kuat dalam berbagai ilmu agama, seperti fikih dan tauhid. Banyak lulusan yang sempat naik ke jenjang tinggi kemasyarakatan dan politik. Mereka tentu telah menambah sendiri pendidikannya secara formal atau non-formal. Namun sebagian besar lulusan pesantren murni tidak dapat beranjak ke posisi yang cukup berbobot.

Kini, karena didorong oleh kebutuhan sosial, ekonomi, teknologi, banyak pesantren yang sudah berubah sosoknya dengan kegiatan-kegiatan pendidikan yang cukup modern, malah dalam beberapa hal ada yang cukup kreatif. Umumnya mereka lebih berani dari sekolah umum untuk berinovasi. Dalam segala kegiatan yang maju dan bervariasi itu namun mereka tetap berpredikat dan menyandang nama 'Pesantren'.

Pesantren juga unik, karena didirikan, dikelola dan ditentukan perjalanan 'hidup' dengan ciri-cirinya oleh seorang tokoh agama, biasanya seorang Haji atau Kiyai, yang cukup kuat ekonominya. Kiyai ini sebagai pendiri, pemilik, manajer, kepala dan ustadz, pengurus asrama dan lain-lain kegiatan. Kiyai pesantren tentu punya banyak pembantu, tetapi ialah yang menjadi tokoh sentral.

Pengelolaannya kebanyakan secara tradisional dan sangat pribadi (personal). Jatuh bangunnya pesantren sangat tergantung pada kepribadian, kemampuan dan aspirasi serta wawasan Sang Kiyai. Banyak pesantren yang amat sayang menjadi merana karena salah urus, salah strategi usaha, tekanan pengaruh sosial-ekonomi di luar masyarakat dan wilayah pesantren, bahkan pesantren bisa 'pecah' karena pertentangan diantara keluarga Kiyai suasana dan kultur yang serba 'mistik' bercampur adat-istiadat lokal yang kental, membuat pesantren bagaikan sebuah 'pulau' di tengah-tengah gelombang perubahan sosial yang menggelegak.

Namun, betapapun pesantren adalah satu contoh atau specimen kemandirian, dan swadaya, dan juga kewiraswastaan yang perlu kita pelajari, dan kita rekonstruksi pengalaman yang ada, agar dapat dijadikan modal untuk membangun sosok pesantren yang lebih dinamis dan maju, menduduki status dan peran yang compatible dengan persyaratan era industri dan informasi, namun tetap memegang ciri-cirinya yang khas keagamaan yang pantas dipertahankan. Betapapun, Pesantren sebagai lembaga pendidikan swasta dan berwirausaha sudah membuktikan kebolehnya sama dengan sekolah-sekolah swasta lainnya, sebagai lembaga yang otonom, sudah privated, salah satu ciri desentralisasi.

Yang jelas struktur dan gaya manajemen perlu dibuat lebih lentur, lebih terbuka lebih profesional dengan memanfaatkan kiat-kiat ilmu administrasi dan teknologi yang cukup modern. Kurikulumnya dibuat lebih berwawasan Iptek, kemasyarakatan, bahasa, termasuk bahasa Arab dan asing lainnya, ketrampilan bisnis pertanian, bangunan pertukangan dan lain sebagainya agar peserta didik dan guru serta pengelola pesantren mempunyai wawasan yang lebih universal. Mutu pengajar pun perlu di tingkatkan, dengan menyadap tenaga kerja berpengalaman praktis.

Untuk ini diperlukan modal intelektual dan modal finansial yang tidak kecil yang belum tentu dapat didukung oleh satu orang atau keluarga kiyai, Pernah terpikir dalam satu seminar

untuk menggabung beberapa pesantren, meskipun agak sulit karena alasan-alasan yaitu tadi, “kepribadian” dan “kemandirian”. Dengan modernisasi manajemen dan keterbukaan dalam organisasi, kiat-kiat seperti merger atau aliansi strategis dapat saja dijelajahi kemungkinannya. Ini salah satu cara untuk menghindari kecenderungan sejumlah pesantren yang bangkrut minta bantuan finansial dan proteksi dari pemerintah. Jika trend ini berlanjut dikhawatirkan akan raiblah ciri khas kepribadian pesantren, sebagai salah satu modal dan model pendidikan Indonesia yang berbasis masyarakat (Community Based) dan mandiri.

PROGRAM WAJIB BELAJAR

UUS PN (1989:2) menyatakan bahwa Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah program pemerintah (1989:2) yang merupakan program nasional yang meliputi sekolah dasar 6 tahun ditambah dengan sekolah lanjutan tingkat pertama 3 tahun. Hal ini dilaksanakan karena pemerintah menyadari betapa penting didalam meneruskan cita-cita nasional yang telah dirancang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945. langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mewujudkan program wajib belajar 9 tahun tersebut adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah hampir keseluruhan desa-desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk daerah yang belum memungkinkan didirikan sekolah maka pemerintah melalui peraturan pemerintah (1989:2) menyelenggarakan sekolah yang sifatnya khusus diantaranya SD kecil, SLTP kecil maupun SLTP terbuka, serta program wajib belajar paket A dan paket B.

Hal tersebut tidak lain untuk memberikan kesempatan belajar terutama pada tingkat pendidikan dasar agar semua masyarakat bahkan sampai ke pelosol mendapatkan kesempatan untuk menikmati program pendidikan seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Karena pemerintah berharap apabila semua masyarakatnya telah menikmati pendidikan minimal pendidikan dasar 9 tahun tersebut, maka cara kerja dan cara pandang terhadap bangsa ini akan semakin bagus sehingga pada saatnya nanti akan mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia sendiri bahkan diharapkan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Program tersebut harus mendapat dukungan dari seluruh warga negara Indonesia, karena betapa bagusnya program tersebut tetapi tidak mendapat dukungan dari masyarakat tentu tidak ada gunanya sama sekali karena program ini ditujukan kepada seluruh warga negara sehingga partisipasi aktif seluruh warga negara sangat menentukan keberhasilan program ini terutama untuk masyarakat yang berada di pedalaman dan perbatasan yang sangat sulit dijangkau oleh sistem persekolahan yang formal seperti yang ada di kota-kota.

Pemasalahan yang ada saat ini adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang relatif sedikit dalam areal yang sangat luas sehingga untuk pergi ke sekolah memerlukan waktu perjalanan yang lama ditambah dengan fasilitas yang kurang dan sulit, sehingga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Padahal masyarakat yang tinggal di daerah terpencil rata-rata memiliki tingkat perekonomian rendah dan hal-hal ini menambah suasana semakin tidak menguntungkan.

Masyarakat di kota pada umumnya agak kurang mengalami masalah karena berkat interaksinya dengan lingkungannya yang maju dan dekatnya fasilitas pendidikan sehingga

pada umumnya mudah untuk mendapatkan fasilitas pendidikan formal, tetapi masih ada juga masyarakat di kota yang belum bisa menikmati fasilitas pendidikan yang sewajarnya, hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya himpitan ekonomi, masyarakat yang kehidupan ekonominya dibawah garid kemiskinan umumnya tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan sebagaimana mestinya.

Memang jumlah masyarakat dikota yang tergolong kurang mampu presentasenya relatif sedikit namun demikian mengingat jumlah penduduknya yang relatif banyak sehingga secara hitungan jumlahnya juga menjadi relatif besar, padahal program pemerintah untuk wajib belajar 9 tahun tersebut berlaku bagi umum dimanapun warga negara tersebut tinggal. Yang menjadi sasaran dalam program wajib belajar 9 tahun ini terutama adalah anak-anak usia sekolah yaitu anak-anak yang berusia 7-15 tahun yang belum mendapatkan kesempatan untuk meraih pendidikan formal di seluruh Indonesia.

Pemerintah berupaya memaksimalkan daya tampung sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas yang ada semaksimal mungkin. Pemerintah juga mengharapkan peran serta swasta untuk membantu mengatasi permasalahan pendidikan ini dengan memberikan kesempatan kepada swasta untuk membuka sekolah-sekolah swasta terutama untuk tingkat dasar agar program tersebut bisa berjalan lancar meskipun pemerintah sendiri mengalami kekurangan daya tampung.

Karena yang menjadi sasaran adalah anak-anak, maka keterlibatan orang tua sangatlah menentukan keberhasilannya. Berdasarkan pengalaman selama ini, maka orang tua yang tingkat pendidikannya cukup tinggi akan juga berusaha agar anaknya dapat menikmati pendidikan formal setinggi mungkin sesuai dengan kemampuan ekonominya karena memang untuk menikmati fasilitas sekolah diperlukan biaya yang cukup banyak, sedangkan orang tua yang tingkat pendidikannya rendah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal biasanya dalam masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang tingkat perekonomiannya rendah sehingga kemampuan untuk menyekolahkan anaknya juga rendah.

Namun demikian untuk menunjang program wajib belajar 9 tahun ini pemerintah telah menggerakkan berbagai kemampuannya sehingga pendidikan (SPP) yang mana diharapkan dengan dibebaskan sumbangan pembinaan pendidikan tersebut semua masyarakat bisa menyekolahkan anak-anaknya terutama di sekolah-sekolah negeri karena memang biayanya telah disubsidi oleh pemerintah.

Maksud baik pemerintah tersebut diharapkan mendapatkan dukungan dari masyarakat terutama yang menjadi fokus perhatian pemerintah yaitu kalangan orang tua atau masyarakat yang kurang mampu, tetapi yang menjadi permasalahan yang mencuat sekarang ini adalah bahwa masyarakat yang kurang mampu tersebut biasanya memaksa anak-anaknya untuk berusaha mencari kehidupannya sendiri, karena bukan hanya tidak mampu menyekolahkan anaknya bahkan tidak mampu membiayai kehidupan anaknya.

Pemerintah tidak hanya sampai disini saja tetapi ada usaha yang lebih maju lagi yaitu dengan menganjurkan kepada masyarakat ekonomi atas untuk menjadi orang tua asuh kalangan masyarakat ekonomi rendah agar dapat menikmati fasilitas pendidikan paling tidak sampai tingkat pendidikan dasar 9 tahun. Pemerintah berharap apabila suatu saat nanti seluruh masyarakat telah mengenyam pendidikan 9 tahun, maka tingkat kecerdasan bangsa secara umum akan naik dan dengan demikian akan semakin mampu bersaing dalam tingkat

internasional yang mana mau tidak mau harus kita masuki juga dengan diberlakukannya era globalisasikan. Ini tentu merupakan tugas yang sangat berat bagi seluruh warga negara yang mempunyai niat baik untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia.

Proses belajar mengajar di dalam kelas mempunyai suatu tujuan tertentu yang diharapkan dicapai oleh siswa. Dalam kegiatan tersebut melibatkan unsur guru dan siswa secara langsung. Guru berfungsi sebagai fasilitator sedangkan siswa berfungsi sebagai individu yang melakukan dan atau mengalami proses belajar. Faktor siswa dalam kegiatan ini merupakan faktor utama. Dalam melihat faktor siswa ini ternyata begitu beragamnya hasil yang dicapai setelah proses, meskipun dididik oleh guru yang sama dengan bahan yang sama dan sistem yang sama pula, karena memang dimungkinkan banyak pula faktor yang mempengaruhi kondisi fisik maupun mental siswa.

Seorang guru harus berusaha betul-betul untuk mengetahui kondisi siswa-siswanya yang dididiknya dan harus pula mengetahui lingkungan dimana siswa itu berada dan bagaimana kondisi mental atau psikologinya sehingga guru mampu membuat atau memasuki jiwa anak didiknya yang pada akhirnya siswa merasa bahwa dirinya dan gurunya adalah bagian dari yang tidak terpisahkan sehingga dengan demikian proses belajar mengajar yang dikerjakan bersama antara guru dan siswa tidak mengalami hambatan dan pada akhirnya proses belajar mengajar akan mencapai tujuannya dengan baik.

Namun demikian yang menjadi masalah bahwa pada umumnya di negara Indonesia ini sifatnya masih sangat banyak keterbatasan yang ada pada guru, hal ini dikarenakan banyak hal diantaranya begitu mengenali siswanya secara mendalam sehingga proses transfer pengetahuan dari guru dan siswa karena disamping keterbatasan waktu juga banyaknya materi yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran.(1989:5).

Keterbatasan di dalam suatu proses bukanlah suatu hambatan yang dijadikan sebagai alasan untuk kegagalan proses tersebut karena bagaimanapun situasinya guru dan siswa harus dapat memanfaatkan suatu keadaan semaksimal mungkin agar keterbatasan yang ada bisa dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan. Karena memang tugas guru dan siswa untuk bersama-sama memanfaatkan berbagai situasi yang ada dan memanfaatkan lingkungan untuk belajar dan tidaklah ada suatu lingkungan khusus yang mewajibkan untuk diadakan suatu tujuan keberhasilan proses belajar mengajar.

Lingkungan yang baikpun belum tentu menjamin suatu proses bisa berhasil dengan baik kondisi kejiwaan terutama kondisi kejiwaan anak didik tidak dapat menerima atau mengalami suatu proses yang diadakan bersama dengan guru untuk bersama-sama menyamakan persepsi terhadap suatu materi yang sedang dibahas, sehingga tidak sedikit dengan fasilitas yang begitu menunjang ternyata belum bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk mencapai suatu tujuan yang dicanangkan dalam suatu proses belajar mengajar .

Begitu menariknya faktor tersebut sehingga peneliti dalam penelitian ini tertarik untuk meneliti pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan orang tua siswa di dalam menentukan prestasi belajar siswa tersebut, karena memang belum pernah diadakan penelitian tentang hal tersebut. (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 1989).

PENDIDIKAN UNTUK ANAK USIA DINI DAN ANAK SD

Anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa memiliki peran strategis bagi kemajuan suatu bangsa. Kesadaran bagi kemajuan suatu bangsa telah ditunjukkan oleh berbagai negara yang pada umumnya telah maju pada berbagai sektor kehidupan. Negara-negara maju telah melakukan investasi besar-besaran dalam program pembinaan, pengembangan dan pendidikan untuk anak, khususnya anak usia dini. Investasi tersebut dapat dilihat hasilnya setelah sepuluh atau dua puluh tahun dari investasi yang ditanam. Dengan kata lain, investasi dalam program pendidikan dan pengembangan anak usia dini merupakan investasi jangka panjang (Rahardjo, 2006).

Setiap anak memiliki kemampuan tumbuh kembang yang terjadi dalam masa yang relatif singkat, sebagian besar justru berlangsung pada masa usia dini. Usia dini (0-5 tahun) merupakan usia yang sangat menentukan, dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Rangsangan setelah masa kritis lewat, kurang memberikan dampak yang optimal bagi perkembangan anak. Karena itu masa ini disebut sebagai masa kritis perkembangan atau masa emas (*golden age*). Pada usia itu kapasitas kecerdasan anak mencapai 50 persen, dan pada usia 8 tahun mencapai 80 persen. Jadi, terlihat betapa pesat pertumbuhan anak pada masa-masa itu. Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi organ tubuh, sekaligus juga memberi rangsangan terhadap perkembangan otak. Pada masa tersebut terjadi pembentukan dasar-dasar sikap dan perilaku serta perkembangan berbagai dimensi kecerdasan (intelektual, emosional, sosial, spiritual, kinestetik dan seni) yang intensif. Periode keemasan tersebut hanya berlangsung satu kali di sepanjang rentang kehidupan manusia. Jika potensi-potensi dasar pada periode tersebut kurang memperoleh berbagai rangsangan maka tidak mustahil kalau potensi anak akan tenggelam atau tidak berfungsi sama sekali (*lost of capacity*) ketika ia tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi dewasa (Susanti, *Pikiran Rakyat*, 11 Feb 2005). Rangsangan yang dimaksud adalah sentuhan pendidikan yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan anak. Di samping itu, tumbuh kembang anak dipengaruhi pula oleh pemeliharaan gizi dan kesehatan. Apabila anak tidak mendapat asupan zat-zat gizi yang dibutuhkan, dan keadaan ini berlangsung lama akan menyebabkan perubahan metabolisme dalam otak, yang akan berakibat terjadi ketidakmampuan berfungsi normal. Pada keadaan yang lebih berat dan kronis, kekurangan gizi menyebabkan pertumbuhan badan terganggu, badan lebih kecil diikuti dengan ukuran otak yang juga kecil. Jumlah sel otak berkurang dan terjadi ketidakmatangan dan ketidaksempurnaan organisasi biokimia dalam otak. Keadaan ini berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan anak (Rahardjo, 2006).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, pada waktu hamil pun, perkembangan otak janin sudah dipengaruhi oleh gizi. Perkembangan otak janin tidak saja dibangun oleh kontribusi genetic dari kedua orangtuanya, tetapi juga oleh keadaan gizi ibunya. Perkembangan otak pada waktu dalam kandungan adalah maksimal. Jika ibu kekurangan gizi, besar kemungkinan bayi yang akan dilahirkan mempunyai berat lahir rendah atau lahir prematur, maka otak bayi juga akan terpengaruh. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah ini dalam perjalanan hidupnya mungkin akan menderita lagi, bila diikuti dengan pemberian makan bayi yang tidak memenuhi syarat gizi dan lingkungan yang miskin. Oleh karena itu, program yang terintegrasi (pendidikan, gizi, dan kesehatan) diperlukan untuk mengarah ke semua kebutuhan dasar anak

agar dapat tumbuh kembang dengan sempurna. Mengingat pengembangan kemampuan sumber daya manusia unggul dimulai sejak anak dalam kandungan, maka seyogyanya seluruh orang tua, calon orang tua dan masyarakat yang melaksanakan pendidikan anak usia dini patut mendapatkan pengayaan tentang pengetahuan tersebut.

Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk membuktikan, pada usia itu memiliki kemampuan intelegensi yang sangat tinggi. Susenas 2000 melaporkan bahwa sekitar 34,5% penduduk Indonesia hanya tamat SD dan lebih rendah (34,6% tidak/belum tamat SD dan 32,0% tamat SD), dan yang tamat SLTP hanya 15%. Sampai dengan tingkat pendidikan dasar tidak terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Sementara itu untuk pendidikan yang lebih tinggi mulai terlihat adanya bias gender (perempuan tamat SLTA 12,8% dan laki-laki 17,55%). Lebih lanjut terlihat adanya kesenjangan penduduk yang terdidik antara daerah perkotaan dan pedesaan. Demikian pula untuk angka buta huruf penduduk yang berusia 10 tahun ke atas juga terlihat adanya perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan dan jenis kelamin (di perkotaan 5,6% dan per desa 13,6%, sedangkan untuk perempuan 14,2% dan laki-laki 6,3%) (Rahardjo, 2006).

Berbagai penelitian di negara maju menunjukkan, pembinaan perkembangan anak usia dini sangat menentukan mutu hasil belajar dan kemampuan belajar anak di SD, SLTP, dan perjalanan hidup seseorang selanjutnya (Soedijarto, *Kompas* 22 Juli 2004). Atas dasar itu, di tengah-tengah upaya untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, serta upaya meningkatkan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan nasional, pemerintah mulai memerhatikan perlunya menangani program yang dapat lebih menyiapkan peserta didik untuk lebih siap dalam mengikuti pendidikan dasar, yaitu pembinaan pengembangan anak usia dini.

Serangkaian studi selama 30 tahun-terutama di Amerika Serikat-telah menunjukkan bahwa program pembinaan anak usia dini dapat memperbaiki prestasi belajar serta dapat meningkatkan produktivitas kerja dan penghasilan di masa depan. Juga bisa mengurangi ketergantungannya pada pelayanan kesehatan dan sosial. Aspek yang menentukan kualitas manusia dan perlu dibina sejak dini adalah kesehatan, nutrisi, dan stimulasi intelektual/emosional anak. Ketiga hal tersebut perlu ditangani secara serentak dan sinergi sejak dini. Bahkan, untuk kesehatan dan nutrisi sudah harus dimulai sejak dalam kandungan (*prenatal*). Karena itu, memulai pembinaan baru pada usia taman kanak-kanak (TK) sudah dipandang terlambat (Rahardjo, 2006).

Selanjutnya ditemukan juga bahwa 50 persen kemampuan kognitif seseorang terbentuk pada usia 0-4 tahun. Karena itu, intervensi perkembangan anak sejak dini dalam tiga hal yang telah disebut di atas, punya pengaruh jangka panjang terhadap kemampuan dan perkembangan intelektual, sosial, dan kepribadian seseorang dalam perkembangan selanjutnya.

Sebanyak 72 persen atau 7,2 juta dari 28 juta anak usia dini (0-6 tahun) belum terlayani oleh pendidikan, baik secara formal maupun non-formal. Penyebabnya karena masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan khusus untuk usia dini. Tempat belajar yang disediakan pemerintah masih minim karena terbatasnya anggaran (Bintariadi, *Tempo Interaktif*, 30 Agustus, 2005). Tidak berbeda jauh dengan data di atas, Susanti (*Pikiran Rakyat*, 11 Feb 2005) mengetengahkan bahwa pada tahun 2001, dari 26,1 juta anak yang ada

di Indonesia baru 7,1 juta atau sekira 28% anak yang telah mendapatkan pendidikan. Terdiri atas 9,6% terlayani di bina keluarga bawah lima tahun, 6,5% di taman kanak-kanak, 1,4% Raudhatul Athfal, 0,13% di kelompok bermain, 0,05% di tempat penitipan anak lainnya, 9,9% terlayani di sekolah dasar. Ini menunjukkan, pentingnya pendidikan usia dini belum mendapatkan perhatian dengan baik.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 jumlah anak usia 0 - 6 tahun sebesar 26,09 juta (12,85%). Dari jumlah tersebut yang telah memperoleh layanan pendidikan anak usia dini baru sekitar 4,5 juta anak (17%). Dalam hal ini kontribusi tertinggi dilakukan melalui program Bina Keluarga Balita (9,5%), Taman Kanak-kanak (6,1%), dan Raudhatul Athfal (1,5%). Kontribusi program Penitipan Anak dan Kelompok Bermain masih sangat kecil, yakni masing-masing baru sekitar 0,04% dan 0,02%. Sedangkan untuk anak usia 4-6 tahun (12,2 juta anak), yakni di Taman Kanak-kanak 1,6 juta anak dan Raudhatul Athfal 0,4 juta anak (EFA Indonesia 2001). Dari data tersebut, nampak bahwa pelayanan terhadap anak usia dini belum optimal dan belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat (Rahardjo, 2006).

Selanjutnya dijelaskan bahwa rendahnya jangkauan layanan pendidikan anak usia dini di Indonesia diduga berpengaruh terhadap tingginya angka siswa mengulang kelas (ASMK) di kelas pemula. Hasil penelitian Balitbang Dikbud (1997) mengungkapkan bahwa angka siswa mengulang kelas di kelas pemula sebesar 6,5%, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan ASMK di tingkat SLTP (0,51%), yang diduga disebabkan oleh kurangnya stimulasi yang diterima anak pada usia dini.

Di samping itu, menurut perkiraan UNICEF (dalam Rahardjo, 2006) pada tahun 1997 sebanyak 6,4 juta balita menderita Kekurangan Energi Protein (KEP) total dan bahkan yang menderita anemi gizi mencapai 7 juta jiwa. Sementara itu yang berisiko kekurangan yodium dan kekurangan vitamin A (*low serum retinol*) berturut-turut sebanyak 6 juta jiwa dan 3,2 juta jiwa. Kekurangan gizi ini sampai pada tingkat yang akan secara tetap mengurangi kapasitas mental dan fisik anak, mengingat 90% dari pertumbuhan otak terjadi pada dua tahun pertama kehidupannya dan karenanya sangat bergantung pada gizi yang diperolehnya. Masih tingginya prevalensi anemi gizi ibu hamil yang kita hadapi saat ini sebesar 51% akan berdampak negatif terhadap kualitas bayi yang dilahirkan. Sebagai akibat dari masih rendahnya status gizi dan kesehatan ibu hamil, banyak bayi yang dilahirkan dengan berat badan yang rendah dan mengalami kematian pada usia dini, bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) sebesar 14%; sementara angka kematian bayi (AKB) sebesar 55 per 1000 kelahiran hidup.

Tingginya prevalensi ibu hamil dan anak balita yang menderita gizi kurang seperti dipaparkan di atas tidak terlepas dari kegagalan mereka untuk mengkomsumsi makanan dalam jumlah yang cukup, baik kuantitas, apalagi kualitas. Pada sisi lain, rendahnya status gizi pada anak balita tersebut juga disebabkan oleh seringnya anak menderita penyakit infeksi, sebagai akibat dari buruknya sanitasi lingkungan, berpendapatan rendah dimana kekurangan pangan dan sanitasi lingkungan yang buruk merupakan bagian dari kehidupan mereka sehari-hari (Rahardjo, 2006).

Ketika anak dilahirkan, otak bayi mengandung 100 miliar neuron dan sekitar 1 triliun *sel glia* yang berfungsi sebagai perekat. Selama tahun-tahun pertama, otak bayi berkembang pesat dengan menghasilkan *neuron* yang banyaknya melebihi kebutuhan. Sambungan itu harus diperkuat melalui berbagai rangsangan karena sambungan yang tidak diperkuat dengan

rangsangan akan mengalami *atrophy* (menyusut dan musnah). Banyaknya sambungan itulah yang memengaruhi tingkat kecerdasan anak. Otak manusia terdiri atas dua bagian yang apabila keduanya dirangsang dan dimanfaatkan secara seimbang akan menciptakan suatu sinergi yang membuat kemampuan otak mencapai 5-10 kali kemampuan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, keseimbangan itu bisa dicapai bila pemanfaatannya dibiasakan sedini mungkin. Begitu juga, sarana kesehatan seperti posyandu, berpengaruh terhadap peningkatan gizi anak, gizi mempengaruhi tingkat kecerdasan anak atau IQ. Jika anak mendapatkan gizi yang buruk maka berisiko kehilangan IQ 20-13 poin, kini jumlah anak yang kekurangan gizi mencapai 1,3 juta, berarti potensi kehilangan IQ anak di negara ini 22 juta poin.

Penelitian di bidang kesehatan dan psikologi berkesimpulan bahwa sejak masa kehamilan hingga prasekolah merupakan masa yang sangat penting bagi pembentukan kecerdasan serta karakter anak. Apa yang diterima atau yang terjadi pada anak usia dini akan mendasar sekaligus melandasi kehidupan anak pada usia dewasa. Masa yang paling penting dalam hidup, yaitu sejak mulai lahir sampai usia 6 tahun karena masa ini kecerdasan anak dibentuk. Jadi para ahli menamakannya sebagai "Periode Emas" atau masa penentuan untuk pertumbuhan anak. Asupan gizi juga memengaruhi kecerdasan anak. Setiap anak dengan gizi buruk berisiko kehilangan IQ hingga 10-13 poin. Sedangkan jumlah anak yang kekurangan gizi di Indonesia mencapai 1,3 juta. Itu berarti kita berpotensi kehilangan IQ sekitar 22 juta poin. Karena itulah, pemenuhan kebutuhan gizi anak harus dilakukan sejak dini (Tim Pendidikan untuk Semua, *Suara Pembaruan*, 10 Oktober 2002)

Dibanding dengan Singapura dan Korea Selatan, Indonesia terlambat dalam hal PAUD. Di kedua negara itu, hampir seluruh anak-anak di sana sudah terjangkau PAUD. Bahkan, di Singapura, masalah penuntasan dua bahasa, yaitu Cina dan Inggris, telah selesai di tingkat TK. Hal itu juga terbukti dengan *Human Development Index* (HDI) mereka yang jauh di atas Indonesia. Singapura nomor 25, Korea Selatan 27, dan Indonesia 110 dari 173 negara (Tim Pendidikan untuk Semua, *Suara Pembaruan*, 10 Oktober 2002). Skor indeks pembangunan perempuan (GDI) Indonesia 2002 di posisi 91, jauh di bawah negara-negara ASEAN lain seperti Philipina (peringkat 77), Thailand (67), Malaysia (56) Brunei (25), dan Singapore (22). Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) menambahkan HDI Indonesia 2002 di Asia Tenggara relatif buruk, berada di posisi tujuh dari 10 negara (Rahadjo, 2006). Dalam kondisi seperti itu tentunya sulit bagi bangsa Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Carla Shatz (dalam Rahardjo, 2006) mengemukakan bahwa masa kritis perkembangan (*windows of opportunity*) mencakup lima hal yang penting bagi tumbuh kembang anak. *Pertama*, perkembangan penglihatan. Kemampuan penglihatan harus dirangsang pada empat tahun pertama. Rangsangan yang diberikan melewati masa kritis kurang berfungsi bagi kemampuan penglihatan binokular. *Kedua*, perkembangan perasaan/emosi. Sejak umur dua bulan sampai sekitar empat tahun mulau berkembang perasaan stress, kepuasan, perasaan girang, dan sedih. Sedangkan perasaan iri dan empati baru berkembang pada usia tiga tahun. Hal ini terkait dengan fungsi amygdale sebagai tempat menyimpan emosi yang baru berkembang setelah usia 1-2 tahun. Pada masa ini pengasuhan yang penuh kasih sayang, pemenuhan nutrisi, dan perawatan kesehatan merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan

emosi anak. Peristiwa tidak mengenakkan (*traumatic*) yang dialami anak berpengaruh terhadap keseimbangan kematangan emosi. Perkembangan emosi harus mendapatkan perhatian yang seimbang dengan perkembangan kecerdasan, dalam hal ini pendidikan harus memberikan rangsangan positif bagi perkembangan emosi sehingga menghasilkan anak yang cerdas dan memiliki kesadaran diri, mampu mengelola interaksi dengan sesama (*interpersonal*). *Ketiga*, perkembangan kemampuan bahasa. Perkembangan kemampuan bahasan dimulai sejak dalam kandungan. Pada umur satu tahun sudah terbentuk "*peta perceptual*" sehingga anak bisa membedakan suara yang sudah dikenalnya serta membedakan fonem yang diucapkan. Perkembangan kemampuan bahasa ditentukan seberapa banyak anak diajak berbicara dan mendengarkan. Anak yang kurang mendapatkan rangsangan bahasa, kemampuan kosakatanya akan lebih sedikit dibanding dengan anak lainnya, dan hal ini berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dikemudian hari. Pendidikan yang diberikan melalui dongeng, pembacaan buku, dialog, atau merangkai cerita sendiri merupakan rangsangan bagi perkembangan bahasa anak. *Keempat*, perkembangan kemampuan gerak. Masa kritis perkembangan gerakan berlangsung sejak lahir sampai umur dua tahun. Sedangkan perkembangan motorik kasar berlangsung hingga umur empat tahun. Pendidikan yang diberikan dalam bentuk olahraga rekreasi merupakan rangsangan bagi perkembangan motorik kasar, motorik halus, memperbaiki metabolisme otak, sekaligus meningkatkan jumlah synapse, sehingga mempermudah anak mengikuti pembelajaran pada tahap berikutnya. *Kelima*, perkembangan kemampuan musik terjadi antara umur 3 - 10 tahun, namun demikian rangsangan musik hendaknya telah diberikan sejak dalam kandungan. Hasil penelitian Mozart membuktikan rangsangan musik sejak dini akan membina perkembangan di bidang visiospatial, matematika dan logika.

PENUTUP

Keadaan bahwa pendidikan dasar di Indonesia belum mantap akibat manajemen dan pelaksanaannya yang belum tertat, mendorong perlu dipikirkannya tentang upaya mencari dan menemukan strategi untuk membina dan membimbing orang tua dalam keluarga untuk memberikan stimulasi tumbuh kembang anak usia dini secara benar. Artikel ini menunjukkan hasil kajian beberapa permasalahan mendasar dalam pembinaan keluarga serta berbagai bentuk solusinya yang dapat dilakukan pemerintah, akademisi maupun tokoh-tokoh masyarakat.

Permasalahan mendasar dalam meningkatkan dan mengembangkan peran strategis keluarga untuk mendidik tumbuh kembang anak usia dini masih belum ditangani dengan baik. Beberapa permasalahan mendasar yang membutuhkan alternatif pemecahannya adalah: (1) Kondisi-kondisi apakah yang melatar belakangi perlunya pembinaan dan pengembangan keluarga dalam mendidik tumbuh kembang anak usia dini, (2) Peran apakah yang perlu dilakukan keluarga dalam mendidik tumbuh kembang anak usia dini, dan (3) Bentuk-bentuk program alternatif manakah yang dapat dipilih dan disosialisasikan oleh pemerintah desa untuk membimbing dan membina orang tua (keluarga) dan calon orang tua dalam mendidik tumbuh kembang anak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharso, Teguh. 1997. *Survei Desa Model di Kutai Kartanegara: Analisis Kebijakan Untuk Gerbang Dayaku*. Tenggarong: LSM-LP3R.
- Budiharso, Teguh. 2001. Kebijakan Makro Pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia. *DIDAKTIKA*, (1)3:138-147.
- Bintariadi, Bibin, "72 Persen Anak Usia Dini tak Terlayani Pendidikan," *Tempo Interaktif*, 30 Agustus 2005
- Gutama, "Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia di Era Otonomi Daerah Melalui Program PADU", *makalah*, Disampaikan dalam Seminar Nasional PADU, Kamis, 17 Oktober 2002.
- Hamijoyo, S. 2000. *Sistem Pelaksanaan Pendidikan Nasional*. Makalah dibacakan pada Konvensi Pendidikan Nasional IV, 19-22 November 2000. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Rahardjo, Budi, 2006, "Mempersiapkan SDM yan Unggul: Peranan Keluarga Mendidik Anak Usia Dini," *Kaltim Post*, 20 Januari 2006
- Rahardjo, Budi, 2006, "Pendidikan Usia Dini Masih Eksklusif: Peranan Keluarga Mendidik Anak Usia Dini," *Kaltim Post*, 21 Januari 2006
- Soedijarto, "Pendidikan Anak Sejak Dini Tentukan Mutu Hasil Belajar," *Kompas*, 22 Juli 2004
- Sudjana, Nana dkk. 1987. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- Susanti, "Pendidikan Anak Usia Dini," *Pikiran Rakyat*, 11 Februari 2005
- Syaukani. 2001. *Pendidikan Paspor Masa Depan*. Jakarta: Penerbit Nuansa Madani.
- Tim Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*), "80 Persen Anak Belum Tersentuh Pendidikan Usia Dini," *Suara Pembaharuan Daily* 10 Oktober 2002
- Winkel, W.S. 1984. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Gramedia.